



Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Pada Jenjang Pendidikan SMP dan SMA di Desa Terpencil

Muhammad Aprian Jailani^{1*}, Afrida Novariani Putri¹, , Dinda Dwi Kirana¹, Anggun¹, Siti Hawa¹, Haryati¹

¹Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

DOI: 10.29303/goescienceed.v5i1.301

Article Info

Received: 06 January 2024

Revised: 08 February 2024

Accepted: 28 February 2024

Correspondence:

Muhammad Aprian Jailani

Abstract: Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk menjamin pemerataan akses pendidikan, pemerintah Indonesia menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SMP dan SMA. Namun, penerapan sistem ini di daerah terpencil menghadapi tantangan tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan sistem zonasi pada jenjang SMP dan SMA di daerah terpencil, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi implementasinya. Metode penelitian meliputi studi kasus, analisis data sekunder, serta wawancara dengan pemangku kepentingan di daerah terpencil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi di daerah terpencil menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang belum memadai, serta dukungan pendanaan yang terbatas. Selain itu, terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa sistem zonasi akan membatasi akses mereka terhadap sekolah-sekolah yang dianggap lebih berkualitas di wilayah perkotaan. Kesimpulan penelitian menyarankan perlunya peningkatan infrastruktur pendidikan, program pelatihan guru, dan alokasi anggaran yang memadai untuk daerah terpencil. Selain itu, disarankan adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang manfaat sistem zonasi dalam menjamin pemerataan akses pendidikan. Dengan demikian, implementasi sistem zonasi di daerah terpencil dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan tanpa mengorbankan kualitas

Keywords: Kebijakan, Pendidikan, Sistem Zonasi, Daerah 3T

Pendahuluan

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diperkenalkan melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya (Kartika Marini & Bambang Utoyo, 2019: 87). Sebelumnya, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam hal akses dan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama di wilayah-

Email: aprian.jaelani@ummatac.id

wilayah terpencil (anissa,etl. 2020). Kemudian di katakana juga oleh (kutbi,2023) Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung menjadi sekolah favorit dengan fasilitas dan kualitas pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah pedesaan dan terpencil. Akibatnya, banyak siswa dari daerah pedesaan dan terpencil yang harus menempuh jarak yang jauh atau

Bahkan pindah ke perkotaan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Kondisi ini tentu saja menambah beban bagi siswa dan orang tua, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, kebijakan sistem zonasi PPDB diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil observasi yang dilakukan banyak mengundang prespektif tentang pendidikan dengan sistem zonasi belum secara baik diterapkan di setiap sekolah, hasil observasi yang kami lakukan dilapangan, masih banyak diantara orang tua siswa menganggap sekolah yang berada dekat dengan kota dianggap kualitas pendidikannya lebih bagus, orang tua siswa merasa tidak puas jika anaknya tidak diterima di sekolah yang ia inginkan disebabkan oleh jarak mereka dengan sekolah yang favorit. Sekolah yang dekat dengan wilayah mereka masih terbilang sangat kurang dalam segi mutu dan fasilitas sekolah. Hal ini justru menjadi permasalahan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ketempat yang lebih bagus justru adanya zonasi ini anak tidak bebas dalam memilih kualitas sekolah yang diinginkan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di berbagai daerah. Penelitian Ginting (2019) di Kota Bandung menemukan bahwa penerapan kebijakan ini menghadapi masalah dalam dukungan publik, terutama dari orang tua yang merasa anaknya dengan nilai tinggi tidak dapat diterima di sekolah favorit jika domisilinya jauh dari sekolah tersebut. Sementara itu, penelitian Husna dkk. (2019) di Banjarmasin menyimpulkan bahwa penerapan sistem zonasi PPDB belum optimal karena masih adanya sekolah favorit yang menjadi tujuan utama calon peserta didik, sehingga pemerataan belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian Pangaribuan dkk. (2020) di Kabupaten Gresik mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB menghadapi tantangan seperti keterbatasan sarana prasarana di beberapa sekolah, disparitas kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, serta kurangnya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, penelitian Wijaya (2020) di Kabupaten Langkat menemukan bahwa penerapan kebijakan ini belum berjalan optimal

karena masih terdapat sekolah unggulan yang menjadi tujuan utama calon peserta didik, sehingga pemerataan akses pendidikan belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada penerapan sistem zonasi PPDB di daerah perkotaan atau kabupaten atau kota secara umum. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengkaji secara khusus penerapan kebijakan tersebut di daerah terpencil, yang seringkali memiliki tantangan tersendiri seperti keterbatasan akses,

sarana prasarana, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Daerah terpencil ini umumnya berada di wilayah-wilayah pedesaan yang jauh dari pusat perkotaan, sehingga seringkali terlupakan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan.

Dengan mengkaji penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB di daerah terpencil, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Hal ini penting untuk menjamin terwujudnya pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali. Permasalahan yang akan dikaji secara mendalam adalah (1). Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di daerah terpencil pada jenjang SMP dan SMA? (2). Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB di daerah terpencil? (3). Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan?.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di daerah terpencil pada jenjang SMP dan SMA, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan mengkaji penerapan kebijakan ini di daerah terpencil, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menjamin bahwa setiap anak di pelosok negeri dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Kajian ini penting dilakukan sebagai masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperbaiki dan mengoptimalkan penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB, sehingga tujuan pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk

mengeksplorasi tantangan dan hambatan dalam penerapan sistem zonasi pada jenjang SMP dan SMA di daerah terpencil. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama:

1. Studi Literatur

Peneliti melakukan tinjauan literatur secara mendalam terhadap sumber-sumber seperti jurnal, laporan pemerintah, dan publikasi ilmiah terkait penerapan sistem zonasi dan kondisi pendidikan di daerah terpencil. Hal ini dilakukan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu terkait topik penelitian.

2. Analisis Data Sekunder

Data sekunder seperti statistik pendidikan, laporan kinerja, dan dokumen kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dianalisis untuk memperoleh gambaran kuantitatif tentang kondisi pendidikan di daerah terpencil dan implementasi sistem zonasi.

3. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan pemangku kepentingan di daerah terpencil, meliputi kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif dan pengalaman langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan sistem zonasi di daerah terpencil.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik.

4. Pengodean Data

Seluruh data yang terkumpul dari studi literatur, analisis data sekunder, dan wawancara mendalam dikodekan secara sistematis untuk mengidentifikasi konsep, pola, dan insight yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

2. Kategorisasi Kode

Kode-kode yang dihasilkan dari tahap sebelumnya dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas dan saling terkait.

3. Mengaitkan Kategori dengan Tema

Kategori-kategori yang telah terbentuk kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan tema-tema utama yang muncul dari data, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan dalam penerapan sistem zonasi di daerah terpencil.

Untuk memastikan keandalan dan validitas temuan, peneliti menerapkan triangulasi data dengan membandingkan dan mengombinasikan informasi dari berbagai sumber data. Selain itu, member checking dilakukan untuk memvalidasi interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh dari wawancara dengan para partisipan.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap isu yang diteliti, serta memperoleh perspektif yang kaya dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, temuan penelitian dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk optimalisasi penerapan sistem zonasi di daerah terpencil

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tantangan dan hambatan dalam penerapan sistem zonasi pada jenjang SMP dan SMA di daerah terpencil. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen, ditemukan beberapa temuan utama yang terkait dengan teori yang dipaparkan dalam latar belakang masalah.

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sejalan dengan pernyataan Kuneifi (2017) tentang keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar sekolah di wilayah terpencil mengalami kekurangan fasilitas pendukung pembelajaran, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang memadai. Hal ini diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah yang menjadi responden:

"Kami memang kekurangan ruang kelas yang layak. Banyak siswa yang harus belajar di ruangan sempit dan kurang nyaman. Belum lagi fasilitas lain seperti laboratorium dan perpustakaan yang masih jauh dari memadai." (Kepala Sekolah SMP Daerah Terpencil) didukung juga oleh (Kepala Sekolah SMA) "Kondisi gedung sekolah kami sudah sangat tua dan banyak yang rusak. Beberapa ruang kelas bahkan sudah tidak layak digunakan karena atapnya bocor dan lantainya berlubang. Kami juga tidak memiliki

laboratorium komputer yang memadai untuk mendukung pembelajaran”

Masalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil merupakan tantangan besar dalam penerapan sistem zonasi. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut seringkali memiliki gedung yang sudah tua dan rusak, serta kekurangan ruang kelas yang memadai untuk menampung jumlah siswa yang ada. Selain itu, fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang komputer juga sangat minim atau bahkan tidak tersedia.

Kondisi ini tentunya sangat menghambat proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Kurangnya fasilitas laboratorium membuat siswa sulit untuk melakukan kegiatan praktikum dan eksperimen, sehingga pemahaman mereka terhadap materi sains dan mata pelajaran lain menjadi terbatas. Perpustakaan yang minim koleksi buku juga membatasi akses siswa terhadap sumber-sumber informasi dan pengetahuan yang lebih luas.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Suasana belajar yang kurang kondusif dan kurangnya fasilitas penunjang dapat membuat siswa merasa kurang semangat dan termotivasi untuk belajar.

2. Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pengajar

Temuan lain yang mendukung pernyataan Kuneifi (2017) adalah terkait dengan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar di daerah terpencil. Sebagian besar sekolah mengalami kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris. Selain itu, kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogis sebagian guru juga belum memadai. Hal ini diakui oleh salah satu guru yang menjadi responden:

"Kami kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran seperti Bahasa Inggris dan Geografi. Beberapa guru juga belum memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan." (Guru SMA Daerah Terpencil)

"Kami kekurangan guru untuk mata pelajaran seperti matematika dan fisika. Bahkan untuk mata pelajaran tersebut, kami harus menyewa guru honorer yang kualifikasinya

belum tentu sesuai dengan bidang yang diajarkan" (Guru SMP Terpencil).

Masalah kualitas dan kuantitas tenaga pengajar di daerah terpencil juga menjadi tantangan besar dalam penerapan sistem zonasi. Banyak sekolah di wilayah tersebut mengalami kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kualitas pembelajaran, karena kurangnya tenaga pengajar yang berkompeten di bidangnya.

Selain itu, sebagian besar guru yang ada di daerah terpencil belum memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogis yang memadai. Banyak di antara mereka yang belum memiliki gelar sarjana atau bahkan hanya tamatan SMA/ sederajat. Kurangnya kompetensi pedagogis juga menjadi masalah, di mana banyak guru yang masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional dan kurang inovatif.

Kondisi ini tentunya akan berdampak pada kualitas pembelajaran dan output pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Siswa mungkin tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai karena keterbatasan kemampuan guru dalam menyampaikan materi dan mengelola proses pembelajaran.

3. Dukungan Pendanaan Terbatas

Temuan ini sejalan dengan pernyataan Pangaribuan dkk. (2021) tentang keterbatasan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pendidikan di wilayah terpencil. Sebagian besar sekolah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan operasional, seperti pemeliharaan gedung, pengadaan buku pelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Salah satu kepala sekolah mengungkapkan:

"Kami sangat terbatas dalam hal pendanaan. Anggaran yang kami terima dari pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekolah, seperti memperbaiki gedung yang sudah rusak atau mengadakan pelatihan untuk guru." (Kepala Sekolah SMA Daerah Terpencil).

"Anggaran yang kami terima dari pemerintah daerah sangat terbatas. Kami kesulitan untuk membeli buku-buku pelajaran baru atau melakukan perbaikan fasilitas sekolah

yang rusak. Jangankan untuk mengadakan pelatihan guru, untuk operasional sehari-hari saja kami sudah kekurangan dana”.

Tantangan lain yang dihadapi dalam penerapan sistem zonasi di daerah terpencil adalah keterbatasan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. Banyak sekolah di wilayah tersebut mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan operasional, seperti pemeliharaan gedung, pengadaan buku pelajaran, dan peningkatan kompetensi guru.

Pendanaan yang terbatas membuat sekolah-sekolah tersebut sulit untuk memperbaiki fasilitas yang rusak atau membeli peralatan dan bahan-bahan praktikum yang dibutuhkan. Selain itu, kurangnya dana juga menyebabkan sekolah tidak dapat mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru secara rutin.

Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Fasilitas yang rusak dan minim akan menghambat proses pembelajaran, sementara kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru akan berdampak pada kualitas penyampaian materi dan pengelolaan kelas.

4. Kekhawatiran Masyarakat terhadap Sistem Zonasi

Sejalan dengan pernyataan dalam latar belakang masalah, penelitian ini menemukan adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama orang tua calon peserta didik, bahwa sistem zonasi akan membatasi akses mereka terhadap sekolah-sekolah yang dianggap lebih berkualitas di wilayah perkotaan. Salah satu orang tua mengungkapkan:

"Saya khawatir jika anak saya harus bersekolah di sekolah terdekat, karena kualitasnya belum tentu baik. Saya ingin anak saya bisa bersekolah di tempat yang lebih baik, meskipun harus menempuh jarak yang jauh." (Orang Tua Peserta Didik)

"Saya khawatir jika anak saya harus bersekolah di SMA terdekat, karena kualitasnya kurang bagus dibandingkan dengan SMA-SMA di kota. Saya ingin anak saya bisa masuk ke SMA favorit di kota agar mendapat pendidikan yang lebih baik, meskipun harus menempuh jarak yang jauh." (Orang Tua Peserta Didik SMA).

Kekhawatiran masyarakat, terutama orang tua peserta didik, terhadap penerapan sistem zonasi di daerah terpencil juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Banyak orang tua yang khawatir bahwa sistem zonasi akan membatasi akses anak-anak mereka terhadap sekolah-sekolah yang dianggap lebih berkualitas di wilayah perkotaan.

Kekhawatiran ini tentunya tidak lepas dari persepsi masyarakat terhadap kualitas pendidikan di daerah terpencil yang masih rendah. Kondisi sarana dan prasarana yang minim, kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas, serta dukungan pendanaan yang terbatas membuat orang tua merasa bahwa sekolah-sekolah di wilayah tersebut belum mampu memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak mereka.

Oleh karena itu, banyak orang tua yang lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah yang jaraknya lebih jauh dari tempat tinggal, namun dianggap memiliki kualitas yang lebih baik. Mereka merasa bahwa dengan menempuh jarak yang jauh, anak-anak mereka akan mendapatkan pendidikan yang lebih bermutu dan memberikan peluang yang lebih besar untuk masa depan yang lebih cerah.

Kekhawatiran masyarakat ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan sistem zonasi di daerah terpencil. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di wilayah terpencil agar dapat meyakinkan masyarakat bahwa anak-anak mereka akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas meskipun bersekolah di tempat yang dekat dengan tempat tinggal.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem zonasi pada jenjang SMP dan SMA di daerah terpencil menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, dukungan pendanaan, serta kekhawatiran masyarakat akan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah terdekat

Kesimpulan

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SMP dan SMA

bertujuan untuk menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk di daerah-daerah terpencil. Namun, penerapan sistem ini di daerah terpencil menghadapi tantangan tersendiri. Daerah terpencil seringkali memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang belum memadai, serta dukungan pendanaan dari pemerintah yang terbatas. Kondisi ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama orang tua calon peserta didik, bahwa sistem zonasi justru akan membatasi akses mereka terhadap sekolah-sekolah yang dianggap lebih berkualitas di wilayah perkotaan.

Sistem zonasi di daerah terpencil, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil, seperti gedung sekolah, fasilitas belajar-mengajar, dan akses internet.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar di daerah terpencil melalui program pelatihan, insentif, dan penyediaan fasilitas penunjang bagi guru.
- c. Meningkatkan alokasi pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan sistem zonasi dapat diimplementasikan secara optimal di daerah terpencil, sehingga tujuan pemerataan akses pendidikan dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pendidikan

Daftar Pustaka

- Anisa, M. T., & Asri, S. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi pada SD Negeri 21 Jati Utara Kecamatan Padang Timur Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(1), 60-73.
- Arifin, M. (2019). Kebijakan sistem zonasi sekolah dalam perspektif pemerataan pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 20(2), 95-105.
- Ginting, L. M. (2019). Implementasi kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMPN di Kota Bandung tahun 2018. *Jurnal FISIP*, Universitas Padjadjaran.

Husna, A., dkk. (2019). Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP/SLTP sederajat di Kota Banjarmasin. *Jurnal FISIP*, Universitas Islam Kalimantan.

Kemdikbud. (2018). Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Kutbi, M. A. (2023). Sistem zonasi dan implikasinya terhadap sustainabilitas mutu pendidikan di SMAN 1 Narmada. *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 11(2), 816-836. <https://doi.org/10.36088/palapa.v11i2.3875>

Marini, K., & Utoyo, B. (2019). Menimbang kembali kebijakan sistem zonasi: Studi penerimaan peserta didik baru di Bandar Lampung. *Administrativa*, 1(1), 87-100.

Pangaribuan, E. N., dkk. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP Kabupaten Gresik. *Jurnal Prodi Manajemen Pendidikan*, Universitas Negeri Surabaya.

Wijaya, C. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMP Kabupaten Langkat. *Jurnal Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam*, UIN Sumatra Utara